

# Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme Terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

M. Yunus Abu Bakar\*

*Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya*

*Email: elyunusy@gmail.com*

## Abstract

This paper is aimed at discussing the influence of liberalism dan neo-liberalism in Islamic Education in Indonesia. The existence of Islamic education is always dealing with and grappling with the reality surrounding them. The struggle between Islamic education to meet socio-cultural reality are two possibilities: a. Islamic education gives impact on socio-cultural environment; b. Islamic education is influenced by the reality of social change, by socio-cultural environment. The ideology of liberalism and neo-liberalism, rationalism, freedom, responsibility, fairness, and tolerance are ideals struggled by liberalism, despite the fact that some ideal values fail to realize. While neoliberalism is actually understood the existence of liberal capitalism is the ideology of liberalism that has led to the economic sector. The influence of not only the political, social, and economic, but in education as well which is a view that emphasizes the development of capabilities, to protect the rights and freedoms as well as identify problems and social change efforts in order to maintain stability for a long time. Central ideas of education revolves around the application of the concept of rationality, freedom, and equality. Education is a democratic distribution of rationality with a balanced treatment, between freedom and equality of rights and obligations, students. Teachers function as facilitators and change the learning process. Philosophically running constructivism learning including the development of capitalization of education in the form of education commercialization. The fact also has affected in the world of Islamic education.

Diskursus penulisan ini bertujuan membahas pengaruh paham liberalisme dan neoliberalisme terhadap pendidikan Islam di Indonesia. Eksistensi pendidikan Islam senantiasa bersentuhan dan bergulat dengan realitas yang mengitarinya. Pergumulan antara pendidikan Islam dengan realitas sosio-kultural menemui dua kemungkinan: a. Pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosio-kultural; b. Pendidikan Islam

---

\* Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel jl. A. Yani 117 Telpon (031) 8437893 Surabaya

dipengaruhi oleh realitas perubahan sosial, oleh lingkungan sosio-kultural. Paham liberalisme dan neoliberalisme dapat menjadi bagian yang mempengaruhi dunia pendidikan. Individualisme, rasionalisme, kebebasan, tanggungjawab, keadilan dan toleransi adalah idealisme yang diperjuangkan liberalisme, meskipun pada kenyataannya nilai-nilai ideal tersebut banyak yang tidak terwujud. Sedangkan paham neoliberalisme sesungguhnya merupakan eksistensi dari paham kapitalisme liberal, yaitu paham liberalisme yang sudah mengarah pada sektor ekonomi. Pengaruh paham liberalisme tidak hanya pada politik, sosial, dan ekonomi, tetapi juga pada pendidikan, yakni suatu pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak, dan kebebasan serta mengidentifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskremental demi menjaga stabilitas jangka panjang. Ide-ide sentral pendidikan berkisar pada penerapan dari konsep-konsep *rasionalitas*, *kebebasan* dan *kesamaan*. Pendidikan adalah distribusi demokratis dari rasionalitas, dengan perlakuan yang berimbang antara kebebasan dan kesamaan, antara hak dan kewajiban, pada subjek didik. Fungsi guru diganti sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Menonjolkan pembelajaran yang berfalsafah konstruktivisme, termasuk berkembangnya kapitalisasi pendidikan yang berwujud komersialisasi pendidikan. Kenyataan-kenyataan tersebut juga berpengaruh pada dunia pendidikan Islam.

**Keywords:** *liberalism, neoliberalism, the capitalization of education, commercialization of education*

## Pendahuluan

Secara makro, eksistensi pendidikan Islam senantiasa bersentuhan dan bergulat dengan realitas yang mengitarinya. Dalam perspektif historis, pergumulan antara pendidikan Islam dengan realitas sosio-kultural menemui dua kemungkinan: *Pertama*, Pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosio-kultural, dalam arti memberikan wawasan filosofis, arah pandangan, motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru.<sup>1</sup> *Kedua*, Pendidikan Islam dipengaruhi oleh realitas perubahan sosial, oleh lingkungan sosio-kultural, dalam arti

---

<sup>1</sup> Untuk mengambil contoh kemungkinan pertama tersebut dapat dilihat Gerakan Modernisasi Muhammad Abduh awal abad XX di Mesir, di antara pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh dalam pembaruan Islam adalah sebagai berikut: *Pertama*, Membebaskan pikiran dari ikatan taqlid, dan mengajak memahami agama Islam dengan mengikuti ulama-ulama salaf sebelum timbulnya perpecahan-perpecahan. Untuk itu maka umat Islam dalam usaha untuk memahami ajaran Islam harus kembali kepada sumber-sumbernya yang pertama, yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah. *Kedua*, memperbaiki bahasa Arab, dan *ketiga*, memperbaiki pergaulan

penentuan sistem pendidikan, institusi dan pilihan-pilihan prioritas, juga eksistensi dan aktualisasi dirinya.<sup>2</sup>

Pada dasarnya ada dua pengertian tentang pendidikan, yang seringkali diperdebatkan, yakni: Pertama, yang berpandangan bahwa pendidikan pada dasarnya adalah merupakan proses pewarisan, penerusan, dan sosialisasi perilaku individual maupun sosial, yang telah menjadi model anutan masyarakat secara baku. Kedua, yang mengartikan pendidikan sebagai upaya fasilitatif yang memungkinkan terciptanya situasi atau lingkungan di mana pelbagai potensi dasar yang dimiliki anak-didik dapat berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan mereka pada zaman di mana mereka harus *survive*.

Dua sudut pandang yang berbeda tentang pengertian pendidikan ini, masing-masing mempunyai implikasi yang luas terhadap penyelenggaraan pendidikan secara praksis selama ini. Di lingkungan lembaga pendidikan Islam sekarang ini rasanya penekanan pada pengertian yang "pertama" tadi lebih kuat dari pada pengertian yang "kedua", sehingga pendidikan diterjemahkan sebagai usaha mencetak anak-didik dengan sebuah model idola yang bersifat statis. Lain halnya jika penekanan pengertian pada yang "kedua", akan memungkinkan lebih banyak anak-didik untuk menemukan profil dirinya sendiri yang lebih aktual dalam konteks lingkungan dan waktu di mana mereka sedang atau akan mengambil peran dalam hidupnya.

## Liberalisme Neoliberalisme dalam Pendidikan

### 1. Pandangan Liberalisme dan Neoliberalisme

Idealisme liberal sesungguhnya adalah produk dari modernisasi Barat yang telah menggilas cara pandang lama yang

---

hidup umat Islam khususnya bangsa Mesir, dengan menginsyafkan pemerintahan dan rakyat tentang hak dan kewajiban. Ketiga pemikiran Muhammad Abduh tersebut dapat mempengaruhi masyarakat Mesir untuk maju. Baca: A. Mukti Ali, *Ijtihad, dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990. dan H.A.R. Gibb, *Modern Trends In Islam* (New York: Octagon Book, 1978), 92.

<sup>2</sup> Lihat: Azyumardi Azra' "Modernisasi Pendidikan Islam dan Epistemologi Ilmu", Makalah Seminar Internasional tentang Modernisasi Pendidikan Islam: Sistem, Metodologi dan Materi, ISID Gontor, 31 Agustus, 1996; Lihat juga Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Transisi dan modernisasi menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000), 64.

membuat cara berpikir manusia dikendalikan oleh sesuatu di luar dirinya. Ide modernisme yang menonjol adalah pencerahan (*enlightment*), sebuah proses kesadaran dari belenggu adat dan budaya kegelapan yang memasung pikiran manusia selama berabad-abad.

Liberalisme klasik melahirkan banyak pemikir yang memiliki cita-cita untuk mengangkat individu menjadi pemilik dunianya secara otonom dan membebaskan diri dari penghalang yang memasung kebebasan individu untuk mengekspresikan diri sebagai manusia. Karenanya liberalisme dan individualisme biasa menjadi suatu hal yang tak terpisahkan. Keduanya membentuk suatu ideologi dan cara pandang yang sangat penting bagi awal-awal pertumbuhan ide-ide modern di Barat.

Tradisi berpikir liberal dapat diidentifikasi menjadi enam prinsip dasar yang pernah disebutkan oleh Julio Teehankee, seorang pemikir liberal asal Filipina:<sup>3</sup>

- a. Individualisme; Kaum liberal percaya bahwa pribadi atau individu adalah sesuatu yang sangat penting. Seluruh kebijakan liberal mengarah atau diarahkan untuk memberikan ruang kepada kebebasan dan hak-hak individu. Bagi liberal, individualisme lebih penting dari kolektivisme.
- b. Rasionalisme; Kaum liberal percaya bahwa dunia memiliki struktur yang rasional, yang dapat dipahami secara logis. Keteraturan dunia bisa dipahami lewat deliberasi pikiran dan pencarian kritis terus menerus.
- c. Kebebasan; Tak ada kata yang lebih penting bagi seorang liberal selain kebebasan. Kebebasan adalah kemampuan untuk berpikir dan bertindak sesuai dengan mata hati (*conscience*) dan determinasi. Seluruh filosofi liberalisme berangkat dari kebebasan manusia.

---

<sup>3</sup> Julio Teehankee, "Equity and Justice in a Globalized World: A Liberal Review", dalam <http://www.fnf.phlseminars/reports/equety-justice-in-globalized-world-review.htm>

- d. Tanggungjawab; Kebebasan tanpa tanggungjawab adalah keliaran. Orang sering salah memahami liberalisme sebagai liarisme. Liberalisme adalah kebebasan plus tanggung jawab.
- e. Keadilan; Kaum liberal percaya bahwa keadilan adalah nilai moral yang harus dijunjung tinggi, Keadilan bukan berarti mengorbankan hak seseorang demi membela hak yang lainnya. Keadilan adalah pemberian kesempatan kepada setiap individu untuk bersaing dan menggapai hak-haknya,
- f. Toleransi; Sebuah sikap menerima atau menghormati pandangan atau tindakan orang lain, sekalipun pandangan atau tindakan itu belum tentu disetujuinya. Toleransi adalah dasar bagi kebersamaan dan kerukunan hidup. Tanpa toleransi, kebebasan tidak dapat ditegakkan.

Idealismenya seperti itu, meskipun pada kenyataannya nilai-nilai ideal dalam banyak hal tidak terwujud. Terlalu banyak teriak kebebasan, tetapi dia tidak berbuat apa-apa untuk memperolehnya atau sudah mendapatkan kebebasan untuk dirinya sendiri, tetapi membiarkan orang lain terpasung, atau kebebasan yang mengasingkan. Kebebasan semacam ini kadangkala tak berakar pada realitas.

Para pencetus liberalisme sesungguhnya mengaggas nilai-nilai yang dianggapnya ideal bagi watak manusia, mereka memandang tiap orang pada dasarnya dilahirkan bebas, dan memiliki nilai-nilai moral yang berbeda. John Rawl misalnya mengatakan: "Bahwa kita memiliki satu konsep mengenai kebaikan yang lebih baik dari pada konsep lain tidaklah relevan dari sudut pandang moral".<sup>4</sup>

Liberalisme dewasa ini menerima tesis Weber bahwa nilai-nilai bukanlah bagian dunia objektif. Dunia nilai adalah soal pilihan individu. Pandangan bahwa dunia tidak mengandung nilai-nilai objektif sering bersamaan dengan pandangan mereka mengenai kebebasan, yaitu individu bebas untuk memilih nilainya sendiri.

Mendasari tekanan liberal atas kebebasan orang untuk memilih konsep-konsep mereka sendiri tentang kebaikan adalah kegagalan

---

<sup>4</sup> John Rawl, "Fairness to Goodness", dalam *Philosophical Review*, 1975, (Jilid), 536

liberalisme untuk menghadapi kearbitraran kebebasan ini, yang mana orang dikosongkan dari standar-standar untuk mengerahkan pilihan mereka. Kenyataan yang menindas kebebasan ini adalah proses rasionalisasi, tujuan-tujuan konsumsi, dan kekuasaan yang didesakkan secara social. Inilah yang membuat Ross Poole menyakini bahwa liberalisme adalah nihilisme.<sup>5</sup>

Sedangkan paham neoliberalisme sesungguhnya merupakan eksistensi dari paham kapitalisme liberal, yaitu paham liberalisme yang sudah mengarah pada sektor ekonomi, paham ekonomi politik *free market*. Paham yang membatasi peran pemerintah dalam mengelola pasar, dan pengekanan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>6</sup>

## 2. Sekilas Sejarah Liberalisme dan Neoliberalisme

Benih-benih pemikiran liberal dapat dirunut dari zaman sebelumnya, Filsuf yang dianggap punya sumbangan bagi pemikiran liberal adalah Aristoteles (Athena, 384-322SM). Karya yang berjudul *Politik* dianggap telah memberi kontribusi bagi tradisi menghormati hak-hak individu. Meskipun tak disebutkan istilah “hak” dan bahkan ia masih menyetujui perbudakan, ia dianggap memiliki andil dalam memberikan pandangan tentang pemerintahan yang berbeda dengan pemikiran filsuf kuno pada zamannya.<sup>7</sup>

Pada abad ke 15 muncullah seorang pemikir liberal bernama Niccolo Machievelli (Florence, 1469-1527), yang terkenal dengan bukunya *Il Principe*. Ia disebut sebagai penggagas filsafat politik realistik. Ia menginginkan bentuk pemerintahan republik, tentara warga Negara, pemisahan kekuasaan, perlindungan kepemilikan pribadi, dan pengendalian pengeluaran pemerintah diperlukan sebagai

---

<sup>5</sup> Ross Poole, *Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 72

<sup>6</sup> Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1997), 179

<sup>7</sup> Aristoteles mulai dengan ide bahwa pemerintahan yang baik harus membuat rakyatnya ‘bahagia’ dan aktif terlibat. Ia menilai enam bentuk pemerintahan, yakni monarki, aristokrasi, dan ‘polity’ di satu sisi adalah bentuk pemerintahan yang ‘bagus’; sedangkan tirani, oligarki dan demokrasi adalah bentuk yang buruk. Aristoteles adalah pendukung dari sistem kepemilikan pribadi. Ia menolak argumen Plato yang mendukung kepemilikan kolektif yang mana keluarga dan kepemilikan diselenggarakan secara umum.

bentuk kebebasan sebagai dasar republik. Ia menulis secara panjang lebar perlunya inisiatif individual sebagai hal yang sangat penting bagi pemerintahan yang stabil. Ia berpandangan bahwa kebebasan adalah keutamaan yang harus dilindungi pemerintah, dan “rakyat yang baik” akan membuat hukum yang baik. Jadi pemikiran anti Negara dan pengagum kebebasan individual yang dipahami para liberalis modern banyak dipengaruhi oleh pemikir Italia ini.

John Locke (Inggris, 1632-1704) yang melontarkan gagasan “pemerintah dengan persetujuan yang diperintah” (*government with the consent of the governed*) dan hak-hak natural seperti hak untuk hidup, kebebasan, dan toleransi. Kepemilikan pribadi juga ditegaskan.

Adam Smith (Inggris, 1723-1790), sering dianggap sebagai pendiri ekonomi liberal modern yang meletakkan dasar-dasar pemikiran liberal dalam ilmu ekonomi; perdagangan dan kompetisi bebas.<sup>8</sup> Pemikirannya dikembangkan oleh Friedrich von Hayek (1899-1992) yang dikenal sebagai bapak neoliberalisme yang membangkitkan lagi ide pasar bebas pada akhir abad 19.<sup>9</sup> Hayek menganggap Negara harus diatur dengan hukum, tetapi harus menghindari intervensi terhadap masalah individu dan pasar.<sup>10</sup> Pemikirannya dielaborasi lebih jauh oleh Milton Friedman (Amerika Serikat, 1912-2006). Liberalisme dan neoliberalisme yang merupakan

---

<sup>8</sup> Kapitalisme Adam Smith dipilari oleh filsafat yang berkembang pada masa itu, seperti liberalisme, individualisme, rasionalisme serta mempunyai kaitan dengan hukum alam. Lihat Soetrisno PH, “*Welfare State dan Welfare Society*” (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1992), 24-27

<sup>9</sup> Neoliberalisme merupakan lanjutan ideologi liberalisme yang diusung Adam Smith tiga abad lalu. Namun, ada tiga perbedaan antara neoliberalisme dan liberalisme; *Pertama*, dalam liberalisme mekanisme pasar dipakai untuk mengatur ekonomi negara, sedangkan dalam neoliberalisme ia harus digunakan untuk mengatur ekonomi global. Dengan bantuan globalisasi, neoliberalisme bisa menjadi universal value. *Kedua*, dalam neoliberalisme kinerja pasar dipakai untuk memakmurkan individu (individual wealth), sedangkan dalam liberalisme dipakai untuk kemakmuran bersama (commonwealth). Kesejahteraan dan kemakmuran individu lebih diagungkan dalam paham neoliberalisme. *Ketiga*, liberalisme menganggap otoritas regulatif negara diperlukan, sedangkan neoliberalisme justru menekankan pelimpahan otoritas regulatif dari negara ke individu, atau dari *social welfare* ke *selfcare*. <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0702/13/opini/3302881.htm>

<sup>10</sup> Lihat Daliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1997), 143

keberlanjutannya sangat dominan pada era sekarang. Milton Friedman berpendapat bahwa perkembangan moneter merupakan unsur penting yang menentukan dalam perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan penentuan harga-harga; bahwa pertumbuhan jumlah uang beredar merupakan unsur paling bisa diandalkan dalam perkembangan moneter; beredar berpengaruh terhadap tingkat inflasi dan GNP dalam jangka panjang.<sup>11</sup>

Penyeru liberalisme yang paling bergaung pada akhir abad 20 adalah Francis Fukuyama yang berkeyakinan bahwa liberalisme adalah akhir dari sejarah dan tak mungkin akan dikalahkan oleh ideologi lain karena ideologinya sangat ideal dan sesuai dengan manusia.<sup>12</sup>

Ramalan Fukuyama yang dilontarkan sejak hampir 20 tahun itu adalah kisah tentang “kemenangan abadi” demokrasi-liberal (kapitalisme-neoliberal), yang berangkat dari fakta bahwa ekonomi-politik *free market* telah diterima secara meluas oleh mayoritas pemerintah di dunia waktu itu.<sup>13</sup>

Provokasi Fukuyama tentang ‘akhir sejarah’ mendapatkan penolakan yang keras dan meluas dari berbagai kalangan, di antaranya Jacques Derrida. Kritik yang terpenting adalah menyamaratakan perbedaan besar antara yang ideal dan yang riil dalam kiatannya dengan demokrasi liberal. Pernyataan yang gegabah Fukuyama dalam pengantar bukunya yang terkenal itu berbunyi, “Sementara sejumlah Negara saat ini mungkin gagal menciptakan demokrasi liberal yang stabil, dan negara-negara lain mungkin justru merosot ke dalam bentuk-bentuk pemerintahan lain yang lebih primitif seperti teokrasi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, 181

<sup>12</sup> Baca F. Fukuyama, “The End of History?”, *The National Interest*, Vol. 16, Summer, 1989, p. 3; Lihat terjemahan artikel itu dalam Irving Kristol, et.al., *Memotret kanan Baru*, Penyunting Wahyudin (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001), 49-122.

<sup>13</sup> Artikel Fukuyama yang diterbitkan 1989 itu, menelaah kemungkinan-kemungkinan yang optimis dari tesisnya itu. Ia mengatakan bahwa kemenangan ekonomi politik liberalisme dari semua pesaingnya tidak hanya berarti telah mengakhiri perang dingin atau melewati periode sejarah tertentu, tetapi juga akhir dari sejarah manusia dan universalisasi demokrasi liberal barat sebagai bentuk final dari pengaturan manusia.



atau kediktatoran militer, sedangkan idealitas dari demokrasi liberal tak dapat disempurnakan lagi".<sup>14</sup>

### 3. Pengaruh Paham Liberalisme dan Neoliberalisme terhadap Pendidikan

Pengaruh paham liberalisme tidak hanya pada politik, sosial, dan ekonomi, tetapi juga pada pendidikan. Yakni suatu pandangan yang menekankan pengembangan kemampuan, melindungi hak, dan kebebasan serta mengidentifikasi problem dan upaya perubahan sosial secara inskremental demi menjaga stabilitas jangka panjang.

Konsep pendidikan dalam tradisi liberal berakar pada cita-cita Barat tentang individualisme. Ide politik liberalisme sejarahnya berkait erat dengan bangkitnya kelas menengah yang diuntungkan oleh kapitalisme.

Pengaruh liberalisme dan neoliberalisme dalam pendidikan dapat dianalisis dengan melihat komponen-komponen sebagai berikut:

- a. Komponen pengaruh filsafat Barat tentang manusia universal, yaitu manusia yang "rasional liberal". Ada beberapa asumsi yang mendukung konsep manusia "rasional liberal" seperti pertama, semua manusia memiliki potensi sama dalam intelektual; kedua, baik tatanan alam maupun norma sosial dapat ditangkap oleh akal; ketiga, "individualis", yakni adanya anggapan manusia adalah atomistik dan otonom. Menempatkan individu secara atomistik, membawa pada keyakinan bahwa hubungan sosial sebagai kebetulan, dan masyarakat dianggap tidak stabil karena ketertarikan anggotanya yang tidak stabil.
- b. Kaitannya dengan sekolah, pendidikan liberal menganggap tujuan sekolah menyediakan informasi dan ketrampilan yang diperlukan oleh siswa supaya belajar sendiri secara efektif. Sekolah mengajar siswa bagaimana menyelesaikan masalah praktis melalui penerapan tata cara penyelesaian masalah secara perseorangan maupun kelompok, berdasarkan metode-metode ilmiah-rasional. Jadi pengetahuan adalah alat yang diperlukan untuk pemecahan masalah praktis.

---

<sup>14</sup> Kritik Derrida ini dibahas dalam Stuart Sim, *Derrida dan Akhir dari Sejarah* (Yogyakarta: Jendela, 2002), p. 45-46 yang didasarkan pada buku Jacques Derrida,

- c. Pandangan Liberal tentang anak dan siswa sebagai berikut:
- 1) Individu dipandang sebagai pribadi yang unik, yang menemukan kepuasan terbesar dalam mengungkapkan dirinya menanggapi kondisi-kondisi yang berubah. Anak umumnya cenderung menjadi baik berdasarkan konsekuensi-konsekuensi alamiah dari perilakunya sendiri.
  - 2) Anak adalah individu yang merupakan unit psikologis yang relatif otonom, yang bergerak dalam menanggapi kondisi-kondisi personal dan sosial yang selalu berubah-individualisme psikologis.
  - 3) Ketidaksetaraan moral antar-perorangan sehubungan dengan nilai intrinsik mereka sebagai perorangan, dan percaya pada kesetaraan fundamental antar-perorangan jika persoalannya sampai kepada penerapan kecerdasan praktis demi memecahkan masalah praktis yang sifatnya personal maupun sosial, dipadukan dengan ketidaksetaraan yang sangat nyata.
  - 4) Sifat-sifat kurikulum yang dibuat pun harus menekankan pada keefektifan personal, berpusat pada masalah praktis.<sup>15</sup>
- d. Sekolah; Tradisi liberal mengajarkan suatu sistem pendidikan yang jauh dari model doktriner dan berusaha menghilangkan tradisi-tradisi pengekangan terhadap individu atau pengekangan-pengekangan dogma feodalistik yang menyokong tatanan politik yang otoriter dan totaliter. Tekanan pada cita-cita kebebasan dan individualisme dan ketidaksukaannya pada kolektivisme dan aturan- membuat pendidikan liberal kebablasan karena anak didik kehilangan kedisiplinan yang seharusnya didapat dari upaya mendisiplinkan mereka lewat pendidikan sekolah dan lembaga-lembaga yang harus mengatur siswa agar terlatih disiplin.<sup>16</sup> Kaum liberalis berkeyakinan bahwa dalam masyarakat

---

*Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International*, terj. Peggy Kamuf (New York: Routledge, 1994).

<sup>15</sup> William F. O'Neil, *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), 506-508

<sup>16</sup> Para pemikir pendidikan liberal sering sangat suka menguak dan mengekspos kejadian-kejadian yang berupa efek buruk model pendidikan yang menekankan kedisiplinan yang dianggapnya militeristik.

terjadi banyak masalah termasuk urusan masalah pendidikan. Namun mereka beranggapan masalah pendidikan tidak akan ada sangkut pautnya dengan persoalan politik dan ekonomi masyarakat. Tetapi pendidikanlah yang bisa menyesuaikan dengan perubahan arah politik dan perkembangan dunia perekonomian.<sup>17</sup>

Di antara tokoh-tokoh yang tergolong berpandangan leberalis di antaranya Lawrence A. Cremin, Jonas F. Soltis dan Kenneth A. Strike yang menekankan pada pemahaman “*the liberal road to cultural*” dalam arti bahwa liberal dimaksudkan sebagai fleksibel, berani, toleran dan bersikap terbuka, dan liberal dalam arti lainnya ialah bahwa pribadi-pribadi penganutnya tidak hanya memegang sikap seperti tersebut di atas, melainkan juga selalu bersifat penjelajah, peneliti secara kontinu demi pengembangan pengalaman.<sup>18</sup>

Ide-ide sentral pendidikan berdasarkan teori ini berkisar pada penerapan dari konsep-konsep rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Pendidikan adalah distribusi demokratis dari rasionalitas, dengan perlakuan yang berimbang antara kebebasan dan kesamaan, antara hak dan kewajiban, pada subjek anak didik. Secara logis perkembangan teori sumber daya manusia ini adalah penyebaran secara demokratis dari rasionalitas, dengan pemerataan jalan yang serasi dengan asas kebebasan, kesamaan, dan persaudaraan (*liberty, equality, and fraternity*).

Walaupun teori ini dianggap cukup menjanjikan dalam dunia pendidikan, sebagaimana diungkap oleh John Dewey dan pengikut-pengikutnya bahwa anak yang aktif mental dan fisik akan mendatangkan kebaikan-kebaikan pada anak maupun masyarakat.

---

<sup>17</sup> Cara menyesuaikannya melalui reformasi diri secara “kosmetik”, dengan cara melengkapi sarana-prasarana seperti perlengkapan alat tulis, ruang kelas maupun perpustakaan. Pengadaan itu semua bertujuan untuk menyeimbangkan rasio antara murid dengan guru. Tetapi kenyataannya walaupun lembaga pendidikan mempunyai sarana dan prasarana yang komplik belum tentu menghasilkan manusia yang cerdas yang bisa membangun bangsa tetapi hanya melahirkan nilai-nilai angka yang tinggi terhadap para siswanya dan bisa dipastikan hanya akan menjadi buruh kapitalis.

<sup>18</sup> Muhammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1988), 226.

Misalnya, bila anak yang mempunyai cukup kebebasan untuk mempelajari suatu kemungkinan besar akan menyerapnya dengan baik. Ini berarti akan berguna bagi dirinya. Dan bila hal semacam ini dialami oleh banyak orang, maka akan berguna bagi masyarakat.

Akan tetapi ada beberapa kelemahan dalam teori ini sebagaimana diungkap oleh Kneller bahwa pandangan di atas cukup logis, tetapi mengandung kelemahan, yaitu:

- 1) Tidak jelasnya kriteria yang digunakan untuk mengukur atau menentukan apa yang disebut kebaikan atau kegunaan tersebut. Bila hal itu diserahkan saja kepada subjek didik akan keluarlah pendapat yang bermacam-macam yang sifatnya individualistis.
- 2) Sekolah hendaknya menjadi replika dari masyarakat. Justru dalam titik inilah letak 'idealisme' dari progresivisme. Sekolah berbeda bila dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya, karena sekolah adalah masyarakat khusus. Masyarakat khusus, yaitu masyarakat belajar. Jadi ruang lingkup gerak sekolah sebagai masyarakat lebih sempit dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya.<sup>19</sup>

Akan tetapi, kalau kenyataan di atas dikaji dalam perspektif paradigma pendidikan menurut *Giroux and Aronowitz* yang mengategorikan pendekatan pendidikan menjadi tiga aliran, yakni pendekatan konservatif, liberal dan kritis serta mengupas bagaimana masing-masing paradigma pendidikan tersebut berimplikasi terhadap sub sistem pendidikan lainnya, yaitu kesadaran manusia, Freire menggolongkan kesadaran manusia menjadi: kesadaran magis (*magical consciousness*), kesadaran naif (*naival consciousness*), dan kesadaran kritis (*critical consciousness*).<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> George F. Kneller, *Introduction to the Philosophy of Education* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1971), 53.

<sup>20</sup> Lihat Smith, W.A., *The Meaning of consciousness: The Goal of Paulo Freire's Pedagogy*, (Amherst: Center for International Educatio, UMASS, 1976), 22.

### Paradigma Pendidikan dan Implikasi terhadap Metode serta Implikasi Kesadaran Manusia<sup>21</sup>

Paradigma/ metode	Konservatif	Liberal	Radikal	Implikasi kesadaran
Paedagogi	1	2	3	Magik
Andragogi	4	5	6	Naif
Dialog	7	8	9	Kritis

Gambar di atas menunjukkan, bahwa: 1) Paradigma pendidikan konservatif biasanya selalu memakai metode pendidikan pedagogi, dan implikasi kesadaran yang diperoleh adalah kesadaran magik.<sup>22</sup> 2) Paradigma pendidikan liberal biasanya selalu memakai metode andragogi, dan implikasi kesadaran yang diperoleh adalah kesadaran naif.<sup>23</sup> 3) Paradigma pendidikan radikal biasanya selalu menggunakan

<sup>21</sup>Mansour Fakih, et. al., *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis* (Yogyakarta: Read Book, 2001), 19.

<sup>22</sup> Kesadaran magis, yakni kesadaran masyarakat yang tidak mampu mengetahui kaitan antara satu faktor dan faktor lainnya. Misalnya saja masyarakat miskin yang tidak mampu melihat kaitan kemiskinan mereka dengan sistem politik dan kebudayaan. Kesadaran magis lebih melihat faktor di luar manusia (*natural* maupun *supranatural*) sebagai penyebab ketidakberdayaan. Dalam dunia pendidikan, jika proses belajar mengajar tidak mampu melakukan analisis terhadap suatu masalah, maka proses belajar mengajar tersebut dalam perspektif Freirean disebut sebagai pendidikan *fatalistik*. Proses pendidikan model ini tidak memberikan kemampuan analisis, kaitan antara sistem dan struktur terhadap satu permasalahan masyarakat. Murid secara dogmatik menerima 'kebenaran' dari guru, tanpa ada mekanisme untuk memahami 'makna' ideologi dari setiap konsepsi atas kehidupan masyarakat.

<sup>23</sup> Kesadaran ini lebih melihat 'aspek manusia' menjadi akar penyebab masalah masyarakat. Dalam kesadaran ini 'masalah etika, kreativitas, *need for achievement*' dianggap sebagai penentu perubahan sosial. Jadi dalam menganalisis mengapa suatu masyarakat miskin, bagi mereka disebabkan karena 'salah' masyarakat sendiri, yakni mereka malas, tidak memiliki jiwa kewiraswastaan, atau tidak memiliki budaya membangun dan seterusnya. Oleh karena itu *man power development* adalah suatu yang diharapkan akan menjadi pemicu perubahan. Pendidikan dalam konteks ini juga tidak mempertanyakan sistem dan struktur, bahkan sistem dan struktur yang ada adalah sudah baik dan benar, merupakan faktor *given* dan oleh sebab itu tidak perlu dipertanyakan. Tugas pendidikan adalah mengarahkan agar murid dapat beradaptasi dengan sistem yang sudah benar.

metode pendidikan dialog, dan implikasinya kesadaran yang diperoleh adalah kesadaran kritis.<sup>24</sup>

- e. Hal-hal yang berkaitan dengan infra struktur, rasio perbandingan guru dan murid, fungsi guru dan lainnya:
  - 1) Infra-struktur; membangun kelas dan fasilitas baru, memodernkan peralatan sekolah dengan pengadaan komputer yang lebih canggih dan laboratorium.
  - 2) Usaha menyehatkan rasio perbandingan antara guru dan murid.
  - 3) Berbagai investasi untuk meningkatkan metodologi pengajaran dan pelatihan yang lebih efisien dan partisipatif, seperti kelompok dinamik (*group dynamics*), *learning by doing*, *experimental learning*, *cooperative learning*, *contextual teaching-learning (CTL)* dan lain sebagainya.<sup>25</sup>
  - 4) Modernisasi dan pembaruan pembelajaran yang berpusat pada keaktifan dan kebebasan individu katakanlah '*student centered education*- masalah-masalah yang terjadi di masyarakat bukannya berkurang atau hilang, melainkan dari ke hari justru bertambah dan semakin menumpuk, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan (liberal) telah mengalami kegagalan.
  - 5) Fungsi guru diganti sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran.

---

<sup>24</sup> Kesadaran kritis melihat aspek sistem dan struktur sebagai sumber masalah. Pendekatan struktural menghindari '*blaming the victims*' dan lebih menganalisis untuk secara kritis menyadari struktur dan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya dan akibatnya pada keadaan masyarakat. Paradigma kritis dalam pendidikan melatih murid untuk mampu mengidentifikasi 'ketidakadilan' dalam sistem dan struktur yang ada, kemudian mampu melakukan analisis bagaimana sistem dalam struktur itu bekerja, serta bagaimana mentransformasikannya. Tugas pendidikan adalah menciptakan ruang dan keselamatan agar peserta didik terlibat dalam suatu proses penciptaan struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik.

<sup>25</sup> Penggunaan metode-metode pembelajaran modern dengan tidak tepat dalam pendidikan agama Islam, justru akan merusak substansi pendidikan tersebut. Seringkali penggunaan metode pembelajaran dapat menghilangkan fungsi guru sebagai guru, dan berganti sebagai fasilitator atau tutor. Bahkan pembelajaran dengan pendekatan CTL dalam Akidah dengan tidak benar akan 'melahirkan' paham *antropomisme* dalam diri anak didik tanpa disadari oleh guru itu sendiri.

- 6) Menonjolkan pembelajaran yang berfalsafah konstruktivisme; yaitu, masing-masing anak mengkonstruksi pengetahuannya sendiri-sendiri.
- f. Demokrasi Pendidikan;<sup>26</sup> Pendidikan liberal memandang bahwa dirinya punya cita-cita kemanusiaan sebagaimana diidealkan para pencetus, penggagas, dan praktisinya, ternyata tujuannya untuk memanusiaikan manusia gagal. Demokrasi dalam tradisi liberalisme adalah demokrasi bebas yang hanya slogan yang dalam kenyataan tak diikuti dengan tindakan untuk memberikan mayoritas warga bersuara, sekolah masih banyak yang elitis.
- g. Kompetisi;<sup>27</sup> Konsep penting dari pendidikan liberal dan neoliberal adalah kompetisi atau persaingan. Hampir semua sekolah, taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, didasarkan ideologi kompetisi. Sistem pemeringkatan adalah salah satu wujud kompetisi. Mulai pendidikan dasar hingga tinggi, siswa diorientasikan berkompetisi. Kompetisi bisa memberi manfaat, baik individual maupun sosial, tetapi dengan kondisi-kondisi tertentu. Orang yang sudah kuat dan mapan dalam ekonomi, pendidikan, dan modal tidak fair jika berkompetisi dengan mereka yang lemah. Ini bukan kompetisi yang sehat, tetapi bias menjadi eksploitasi dan kontraproduktif.<sup>28</sup> Ketika ideologi kompetisi dijadikan basis pendidikan, pendidikan tidak akan peduli dengan nasib mereka yang kalah. Pendidikan

---

<sup>26</sup> Untuk melihat paradigma pendidikan demokratis baca Dede Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan* (Jakarta: Kencana, 2007)

<sup>27</sup> Untuk melihat kompetensi dan keadilan dalam dunia pendidikan baca Francis Wahono, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetensi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)

<sup>28</sup> Sesuai dengan paradigma berpikir neoliberal, dalam kompetisi harus ada pemenang dan pecundang. Ketika ideologi kompetisi dijadikan basis pendidikan, *output* pendidikan hanya akan menghasilkan pemenang dan pecundang. Kita tidak sadar, ideologi kompetisi yang diciptakan neoliberal didesain untuk kepentingan pemenang. Karena yang mendesain, menyebarkan, dan mendesakkan kepada publik adalah pemenang, yaitu mereka yang kuat secara ekonomi, politik, pendidikan, dan modal. Di sini pertautan antara pengetahuan dan kekuasaan ala Foucaultian atau pengetahuan dan kepentingan ala Habermas menjadi jelas.

tidak akan peduli dengan pertanyaan: akan dikemanakan mereka yang bodoh, tidak mampu, dan miskin? Pertanyaan seperti ini tidak hanya tidak relevan bagi kaum neoliberal, tetapi sudah jelas jawabannya: mereka akan jadi pecundang, tersingkir, dan jadi warga kelas dua di masyarakat. Ini adalah konsekuensi logis dari ideologi kompetisi.<sup>29</sup> Ketika ideologi kompetisi dijadikan basis pendidikan, sesungguhnya pendidikan kita hanya didesain untuk kepentingan para pemenang, yaitu mereka yang cerdas, pandai, dan kuat modal ekonomi dan modal sosial. Pendidikan kita tidak didesain untuk kepentingan orang-orang miskin, tidak mampu, bodoh, dan lemah modal ekonomi dan sosial. Dengan demikian, sebenarnya ideologi kompetisi hanya menjustifikasi privilese orang-orang yang sudah kuat.

- h. Pendidikan Komersial; Liberalisme yang mempengaruhi sektor ekonomi yang pada akhirnya melahirkan neoliberalisme, dan neoliberalisme ini melahirkan kapitalisme, dan kapitalisme mempengaruhi dunia pendidikan dalam segala bentuk.<sup>30</sup> Kapitalisme pendidikan akan melahirkan komersialisasi pendidikan. Walaupun demikian, ada dua pengertian yang kontroversial dalam pengertian komersialisasi sebagai berikut: *Pertama*, Komersialisasi pendidikan yang mengacu pada lembaga pendidikan dengan program serta perlengkapan mahal. Pada pengertian ini, pendidikan hanya dapat dinikmati oleh sekelompok masyarakat ekonomi kuat, sehingga lembaga seperti ini tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi karena

---

<sup>29</sup> Ideologi kompetisi tidak pernah mempertanyakan secara kritis: mengapa mereka kalah? Apakah karena mereka tidak mampu atau karena ada faktor lain yang membuat mereka tidak bisa bersaing? Tentu tidak adil dan tidak fair anak yang sejak kecil mendapat pendidikan yang memadai dan elite bersaing dengan anak yang hanya sekolah di madrasah di pelosok desa. Karena, kompetisi mensyaratkan adanya kesetaraan dari partisipan yang berkompetisi.

<sup>30</sup> Pertama yang paling umum adanya kapitalisme adalah perhitungan rasional (*capital*), yang meliputi: *Pertama*, pemilikan semua sarana fisik untuk produksi, seperti tanah, bahan mentah, mesin perlatan dan seterusnya sebagai milik usaha-usaha industrial swasta otonom yang bisa dijual; *Kedua*, akuntansi melibatkan kebebasan pasar, yaitu tidak adanya pembatasan-pembatasan irasional atas perdagangan; *Ketiga*, akuntansi kapitalisme membutuhkan teknologi rasional; *Keempat*, menyangkut hukum yang dapat diperhitungkan; dan *Kelima*, pekerja bebas.



mereka memang tidak memperdagangkan pendidikan. Pemungutan biaya yang tinggi adalah untuk memfasilitasi jasa pendidikan serta menyediakan infrastruktur pendidikan yang bermutu, seperti menyediakan fasilitas teknologi informasi, laboratorium dan perpustakaan yang baik, serta memberikan kepada para guru atau dosen gaji menurut standar. Sisa anggaran yang mereka peroleh ditanamkan kembali dalam bentuk infrastruktur pendidikan. Komersialisasi pendidikan jenis ini tidak akan mengancam idealisme pendidikan nasional, akan tetapi perlu dicermati juga, karena dapat pendiskriminasian dalam pendidikan nasional;<sup>31</sup> Kedua, komersialisasi pendidikan yang mengacu kepada lembaga pendidikan yang hanya mementingkan uang pendaftaran, dan uang kuliah saja, tetapi mengabaikan kewajiban-kewajiban pendidikan.<sup>32</sup> Dalam hal ini, Samuel Bowles dan Herbet Gintis mengeluhkan model sekolah yang diorganisasi seperti perusahaan, keduanya melihat bahwa organisasi ekonomi kapitalis mempengaruhi hubungan-hubungan antara pelbagai elemen pendidikan di sekolah yang tidak jauh berbeda dengan bagaimana ekonomi diorganisasi untuk menghasilkan produksi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Lahirnya Sekolah Unggulan, Elit, dan Favorit pada dekade tahun 1990-an (sekarang lahir RSBI, SI, SNN) dapat dikategorikan model pertama, seperti: Pelita Harapan, Global, Ciputra, Al-Kausar, Madania, Dwi Warna, Insan Cendikia, dan Universitas Pelita Harapan dan lainnya. Pada kasus Universitas Pelita Harapan ini sebetulnya dirancang pada saat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dijabat oleh Fuad Hasan (1985-1993), tetapi izin tidak keluar, dan baru keluar pada waktu kementerian dijabat oleh Wardiman Djojonegoro (1993-1998); Sikap Fuad Hasan yang ketat dalam mengeluarkan izin pendirian sekolah baru elit dan mahal itu tidak terlepas pandangannya terhadap pendidikan. Menurutnya, pendidikan merupakan ikhtiar pembudayaan demi peradaban manusia. Pendidikan tidak hanya merupakan prakarsa bagi terjadinya pengalihan pengetahuan dan ketrampilan (*transfer of knowledge and skill*), tetapi pengalihan nilai-nilai budaya dan norma-norma sosial (*transmission of cultural values dan social norms*). Fuad Hasan, "Pendidikan adalah Pembudayaan" dalam *Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra. 2004), p. 55

<sup>32</sup> Baca Mughtar Buchori, *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu* (Yogyakarta: Kanisius, 2001)

<sup>33</sup> Lihat Samuel Bowles Dan Herbert Gintis, *Schooling in Capitalist America* (New York: basic Book, 1976)

- i. Kapitalisme Pendidikan; Pola kapitalisasi pendidikan di Indonesia tidak lepas dari *grand design* paham kapitalisme global. Jika dulu ketika pemerintah kolonial Belanda hanya memberikan kesempatan pada penduduk pribumi (*inlander*) untuk sekolah sampai SR, sementara itu golongan ningrat (*borjuis*) saja yang mempunyai kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa faktor munculnya kapitalisme pendidikan di Indonesia antara lain; *Pertama*, Orientasi pendidikan bukanlah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa atau membangun karakter bangsa menuju sempurna (*insan kamil*), akan tetapi berorientasi pada pemenuhan ketrampilan dasar (*life skill*) untuk memenuhi kebutuhan teknis perusahaan asing (*multi national corporation*) yang sangat jelas pro Barat dan kapitalis (*neoliberal*).<sup>34</sup> Pandangan bahwa pendidikan sebagai instrumen dari industri dan sekaligus pendidikan menjadi sub koordinat dari sektor industri dengan konsep *link and machth*. Walaupun konsep ini gagal dengan sendirinya ketika Indonesia dilanda multi krisis dan banyak industri nasional yang runtuh. *Kedua*, pandangan baru dalam melihat pendidikan sebagai bagian dari investasi masa depan (*human investment*). *Ketiga*, maraknya kodifikasi pendidikan itu adalah secara matematis pangsa pasar dan tidak akan pernah habis. *Keempat*, swastanisasi pendidikan yang menjadikan sekolah lanjutan dan Perguruan Tinggi seperti perusahaan yang menarik biaya sebanyak-banyaknya dari siswa. *Kelima*, makin kompetitifnya tingkat persaingan antara pengelola lembaga pendidikan sehingga tidak mungkin lagi menempuh cara-cara konvensional (dari mulut ke mulut atau melalui brosur saja) untuk memasarkan lembaga mereka.

Identifikasi pengaruh liberalis dan neoliberalisme ke dunia pendidikan di atas, dapat diklasifikasikan menjadi 3 model, yaitu:

1. *Liberalisme Metodis*; Kaum liberalisme metodis adalah mereka yang bersikap bahwa metode-metode pengajaran harus

---

<sup>34</sup>Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI atas perbandingan  
<sup>36</sup>Q.S. al-Shams, 91:7-8.

disesuaikan dengan jaman, namun tujuan pendidikan, isi tradisionalnya secara fundamental tidak memerlukan penyesuaian yang penting. Maria Montessori sebagai tokoh liberalisme metadis- mengusulkan tentang cara mengajar yang baru tetapi sasaran-sasaran atau isi pendidikan tetap dipertahankan. Oleh karena itu definisi liberal metadis adalah seseorang yang mengusulkan sebuah cara baru dalam mengajar tetapi ia tidak bersikap kritis terhadap tujuan-tujuan dan isi pendidikan yang sudah ada.

2. *Liberalisme Direktif*; Aliran ini menginginkan perubahan yang mendasar dalam hal tujuan sekaligus dalam hal cara kerja sekolah-sekolah sebagaimana adanya. Penganut aliran ini menganggap wajib belajar adalah perlu dan memilih untuk mempertahankan beberapa keperluan dasar serta mengajukan penetapan tentang isi pelajaran yang akan diberikan kepada siswa. Di sisi lain mereka bersikap bahwa cara tradisional (baik sasaran, isi, dan metode) memerlukan perombakan secara radikal dari orientasi awal yakni cara otoritarian tradisional ke arah yang lebih tepat yaitu mengajar setiap anak untuk berpikir secara efektif bagi dirinya sendiri.
3. *Liberalisme Non Direktif*; Kaum liberalisme non direktif akan sepakat terhadap pandangan bahwa tujuan dan cara pelaksanaan pendidikan perlu diarahkan pada pendidikan yang mengajar siswa untuk memecahkan masalah-masalahnya secara efektif. Namun mereka ingin mengurangi seluruh batasan dengan cara melenyapkan hal-hal seperti wajib belajar dan pengajaran mata pelajaran wajib, kemudian mengganti wewenang lembaga dengan kebebasan para siswa untuk memilih apakah mereka ingin belajar atau tidak, apa yang ingin dipelajari dan memberi mereka kebebasan untuk memilih pengalaman-pengalaman pendidikan apapun yang mereka anggap paling relevan dengan kebutuhan-kebutuhan personil mereka. Dengan kata lain siswa sendirilah yang menentukan apakah mereka ingin belajar sesuatu atau tidak menetapkan kapan, di mana, dan sejauh mana mereka ingin belajar.

## Pengaruh Liberalisme dan Neoliberalisme terhadap Pendidikan Islam

Identifikasi pengaruh liberalisme terhadap pendidikan di Indonesia di atas, dapat dijadikan parameter untuk melihat sejauh mana dunia pendidikan Islam di Indonesia telah dipengaruhi oleh paham liberalisme.

Sebagaimana dalam pendahuluan di atas, bahwa eksistensi pendidikan Islam senantiasa bersentuhan dan bergulat dengan realitas yang mengitarinya, dalam perspektif historis, pergumulan antara pendidikan Islam dengan realitas sosio-kultural menemui dua kemungkinan: *Pertama*, Pendidikan Islam memberikan pengaruh terhadap lingkungan sosio-kultural, dalam arti memberikan wawasan filosofis, arah pandangan, motivasi perilaku, dan pedoman perubahan sampai terbentuknya suatu realitas sosial baru; *Kedua*, Pendidikan Islam dipengaruhi oleh realitas perubahan sosial, oleh lingkungan sosio-kultural, dalam arti penentuan sistem pendidikan, institusi dan pilihan-pilihan prioritas, juga eksistensi dan aktualisasi dirinya.

Analisis atas pengaruh liberalisme dan neoliberalisme terhadap dunia pendidikan Islam dapat dikemukakan sebagai berikut:

### 1. Pandangan terhadap anak didik.

Pandangan terhadap anak didik, sebagai “miniatur” orang dewasa adalah merupakan pengaruh nyata dalam filsafat Barat, akibatnya perilaku para guru di beberapa pendidikan Islam sekarang ‘jauh’ dari ‘mendidik’, dan lebih pada sikap ‘pembiaran’; perintah dan larangan yang seharusnya menjadi instrumen penting pendidikan tidak digunakan lagi. Dalam Islam, “perintah dan larangan” adalah substansi pendidikan Islam, dan Islam memandang anak didik sebagai makhluk yang sedang berada dalam proses perkembangan dan pertumbuhan menurut fitrahnya masing-masing. Mereka memerlukan bimbingan dan pengarahan yang konsisten menuju ke arah titik optimal kemampuan fitrahnya.<sup>35</sup> Ada hadis Nabi saw yang menyatakan, bahwa anak-anak perlu diajari, dibimbing untuk shalat

---

<sup>35</sup>H. M. Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), 144.

pada waktu umur 7 tahun, dan bahkan diperingatkan dengan keras pada umur 10 tahun.

Di samping itu beberapa gambaran manusia menurut al-Qur'an dapat dilihat sebagai berikut:

Oleh karena itu, pendidikan ditujukan sebagai pembangkit potensi-potensi baik yang ada pada anak didik dan mengurangi potensinya yang jelek.<sup>36</sup>

## 2. Orientasi Pendidikan

Lembaga pendidikan Islam sekarang lebih pada orientasi yang bersifat *transfer of knowledge and skill* dalam mengembangkan proses intelektualisasi, dan kurang perhatiannya dalam pembentukan '*qalibun Salīm*', dengan berupaya terwujudnya generasi yang memiliki "*bastatan fi al-ilmi wa al-jism*", yang diliputi oleh spiritualisasi dan disiplin moral yang islami. Pada akhirnya wawasan pendidikan agama menjadi terbelah, di satu pihak mengarah kepada "*priestly religion*" (agama kewalian), dan di lain pihak mengarah kepada "*prophetic religion*" (agama kekarya-an). Pendidikan agama kerap kali hanya dipahami esensinya, tapi tidak dipahami substansinya. Prinsip filosofi pendidikan Qur'ani yang memadukan "*tilāwah*", "*tazkiyah*", dan "*ta'lim*" kurang memperoleh perhatian.<sup>37</sup>

Konsep pendidikan Islam sangat mementingkan SDM yang berkualitas, sekaligus mementingkan kualitas kehidupan duniawi dan ukhrawi secara integral. Noeng Muhadjir menyebutnya sebagai sosok manusia *integral-integratif*.<sup>38</sup> Menurut Arifin, pada dasarnya tujuan

<sup>36</sup> Jalaluddin Rahmat, *Islaam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1991), 115.

<sup>37</sup> Struktur Kurikulum Madrasah dengan 70% pendidikan umum dan 30% pendidikan agama –sebagai akbiat dari SKB 3 Menteri tahun 1975 -terasa menjadi bukti nyata dari sulitnya madrasah dalam membentuk siswa/siswinya berorientasi dalam pendidikan Islam yang ideal. Kenyataan tersebut sudah diprediksi oleh K.H. Imam Zarkasyi sejak SKB tersebut lahir, walaupun sejarah menyatakan bahwa lahirnya SKB tersebut juga 'dibidani' oleh K.H. Imam Zarkasyi sebagaimana penuturan Prof. Dr. Zakiah Darodjat. Baca M. Yunus Abu Bakar, *Konsep Pemikiran Pendidikan K.H. Imam Zarkasyi dan Implementasinya pada Pondok Pesantren Alumni*, Disertasi, Pascasarjan UIN Yogyakarta, tahun 2007.

<sup>38</sup> Noeng Muhadjir, *Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam dalam Perspektif Modern* (Makalah Seminar Internasional Modernisasi Pendidikan Islam, Sistem, Metodologi, dan Materi di Pondok Modern Gontor Ponorogo, 31 Agustus 1996).

pendidikan Islam adalah merealisasikan Muslim yang beriman bertakwa, dan berilmu pengetahuan, serta mengabdikan kepada-Nya.<sup>39</sup> Al-Abrasyi bahkan merinci, bahwa tujuan (umum) pendidikan Islam senantiasa memperhatikan lima aspek, yaitu: (a) budi pekerti sebagai ruh dari pendidikan Islam; (b) memperhatikan agama dan dunia; (c) memperhatikan segi-segi manfaat, dan tidak semata-mata memperhatikan segi keagamaan, akhlak, dan kerohanian; (d) mempelajari ilmu samata-mata untuk ilmu saja; (e) mewujudkan pendidikan kejuruan dan pertukangan dalam upaya memperoleh rizki.<sup>40</sup> Makna penting dari pandangan al-Abrasyi adalah, baik sains agama maupun sains pengetahuan dan teknologi adalah sama pentingnya bagi ummat Islam dalam mengembangkan tugas mulia sebagai khalifah di muka bumi.

Konsep pendidikan seperti ini seharusnya menjadi motivasi bagi ummat Islam dalam mencari ilmu pengetahuan demi menjunjung tinggi kemaslahatan ummat sebaik-baiknya.

### 3. Lembaga Pendidikan (pesantren/madrasah)

Kebebasan sebagaimana paham liberalisme telah merasuk dinding-dinding madrasah, bahkan telah meracuni pemikiran para siswa maupun mahasiswa Islam. Kalau dilihat dari tri pusat pendidikan, maka substansi pendidikan keluarga adalah “kasih sayang”, substansi pendidikan sekolah adalah “kedisiplinan” dan substansi pendidikan masyarakat adalah “kebebasan”.<sup>41</sup>

Kedisiplinan telah hilang pada pendidikan madrasah, lembaga ini sudah merasa sulit untuk menerapkan ‘disiplin’ secara baik, bahkan sanksi dalam pendidikan sudah tidak mudah untuk dilakukan.

Lembaga pendidikan yang sudah tidak dapat menerapkan pendidikan kedisiplinan, maka ia telah kehilangan fungsi pendidikannya yang sejati.

---

<sup>39</sup> Dikutip oleh Abdullah Idi, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), 17.

<sup>40</sup> Dikutip oleh Abdullah Idi dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), . 139.

<sup>41</sup> Lihat R.Z. Fananie dan R. Zarkasjje, *Pedoman Pendidikan Modern* (Palembang: Penerangan Islam, 1934), 5

#### 4. Guru, Metode, dan lainnya.

Fungsi guru telah diganti menjadi fungsi tutor, ia tidak lagi dapat menjalankan fungsi guru yang ‘membentuk’ dan ‘menanamkan’ nilai-nilai keislaman. Mereka kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang bersifat kognitif menjadi “makna” dan “nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri seseorang lewat berbagai cara, metode, media, dan forum. Selanjutnya “makna” yang terhayati tersebut menjadi sumber motivasi bagi peserta didik untuk bergerak berbuat-berperilaku secara konkret-agamis dalam wilayah kehidupan sehari-hari.

Pendidikan agama adalah pendidikan sikap di mana terlibat nilai-nilai yang biasanya berasal dari cara-cara pemasyarakatan yang diperoleh oleh anak-anak semasa kecil, apalagi objek pendidikan itu memang adalah seperangkat nilai yang tidak dapat dinilai dengan betul atau salah, tetapi dengan baik dan buruk, percaya dan tidak percaya, suka dan tidak suka dan lainnya. Sebaliknya pendidikan ilmu (*knowledge*) terutama yang berkenaan dengan fakta-fakta dan ketrampilan tidaklah terlalu rumit sebab tidak terlalu banyak melibatkan nilai-nilai.<sup>42</sup>

Pendidikan Islam yang sekarang berjalan, agaknya lebih menitikberatkan pada pendekatan *naturalistik-positivistik*. Jenis pendekatan keilmuan yang lebih menitikberatkan pada aspek *koherensi-kognitif*,<sup>43</sup> tanpa banyak menyentuh wilayah *moralitas-praktis*. Walaupun mungkin pengetahuan setingkat lebih tinggi (kemungkinan) dari pada pengetahuan yang menitikberatkan pada aspek *korespondensi-tekstual* yang lebih menekankan pada kemampuan peserta didik untuk menghafal teks-teks keagamaan yang sudah ada.

Prinsip-prinsip dasar keberagamaan Islam yang tercakup dalam Iman-Islam-Ihsan sebenarnya sedari dulu dan sampai kapanpun akan

---

<sup>42</sup> Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*, Jakarta: Pustaka Al-Husna. 1989, 402

<sup>43</sup> Dengan indikator dapat terjawabnya berbagai pertanyaan pengetahuan agama yang bahannya disusun secara sistematis sedenikian rupa, dan jarang pertanyaan yang diajukan mempunyai bobot muatan “nilai-nilai” dan “makna-makna” spiritual keagamaan yang bersifat fungsional dalam kehidupan sehari-hari. M. Amin Abdullah, *Religius*, 60

tetap sama seperti itu adanya. Sedang kondisi sosial kemasyarakatan, perkembangan ekonomi, fluktuasi situasi politik, dan perkembangan ilmu dan teknologi tidak mengenal titik henti.

Dalam wilayah pertama, yakni prinsip-prinsip dasar keberagamaan Islam, perlu pendekatan *doctriner*, sementara dalam wilayah kedua perlu pendekatan *scientific*. Pendidikan dan pengajaran yang diberikan secara *doctriner* akan cepat terasa membosankan dan tidak akan menarik., terutama bagi generasi muda yang telah mengenal berbagai cabang keilmuan empiris (baik *natural science* maupun *behavioral science*). Sedangkan pendekatan kedua dalam sementara waktu cukup menarik bagi peserta didik, tetapi pada klimaksnya tidak dapat membentuk sikap hidup dan pandangan hidup yang jelas. Telaah *scientific* supaya lebih bermakna, harus dibarengi pula oleh pendekatan *doctriner-religius* dengan penghayatan nilai-nilai agama.

#### 5. Kompetisi dan Komersialisai

Kompetisi dan komersialisai telah mempengaruhi eksistensi lembaga pendidikan Islam, baik pada sekolah Islam, madrasah maupun pesantren. Beberapa pesantren telah bergeser dari tradisi nilai luhurnya dengan memberikan pilihan 'cost' asrama yang berjenjang dari yang rendah sampai dengan tarif 'hotel'.

Sedang kompetisi antar madrasah maupun pesantren telah terjadi tanpa memberikan pelayanan yang memadai, berbagai brosur atau iklan dicetak besar-besar, bahkan spanduk dipasang di berbagai sudut jalan untuk dapat menarik konsumen, sehingga fungsi pendidikan Islam telah berubah dari fungsi "dakwah Islamiyah" menjadi sebuah *trading*.

#### Penutup

Sepanjang sejarah, pendidikan Islam mendapat berbagai tantangan yang krusial, apalagi akhir-akhir ini tantangannya menjadi luar biasa dari hal-hal yang bersifat internal seperti SDM, manajemen, *funding*, dan lainnya. Sedangkan tantangan eksternal seperti derasnya berbagai paham "diskonstruktif" baik yang bersifat ekstrim maupun liberal telah banyak mempengaruhi keberlangsungan eksistensi pendidikan Islam.



Para praktisi pendidikan Islam maupun para partisipan harus selalu berusaha dapat mengatasi tantangan tersebut, dan dapat meningkatkan dan memberdayakan (*empowerment*) kelembagaannya baik bersifat *hard system tools* maupun *soft system tools*. []

## Daftar Pustaka

- Abu Bakar, M. Yunus, *Konsep Pemikiran Pendidikan K.H. Imam Zarkasyi dan Implementasinya pada Pondok Pesantren Alumni*, Disertasi, Pascasarjana UIN Yogyakarta, tahun 2007.
- Ali, A. Mukti, *Ijtihad, dalam Pandangan Muhammad Abduh, Ahmad Dahlan dan Muhammad Iqbal* (Jakarta: Bulan Bintang, 1990)
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Trasisi dan modernisasi menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2000).
- Arifin, H. M., *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1991)
- Bowles, Samuel and Herbert Gintis, *Schooling in Capitalist America* (New York: basic Book, 1976)
- Buchori, Muchtar, *Komersialisasi Idealisme Bukan Tabu* (Yogyakarta: Kanisius, 2001)
- Derrida, Jacques, *Specters of Marx: The State of the Debt, the Work of Mourning, and the New International*, terj. Peggy Kamuf (New York: Routledge, 1994).
- Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 1997)
- Fakih, Mansour, et. al., *Pendidikan Populer: Membangun Kesadaran Kritis* (Yogyakarta: Read Book, 2001)
- Fananie, R.Z. dan R. Zarkasjie, *Pedoman Pendidikan Modern* (Palembang: Penerangan Islam, 1934)
- Gibb, H.A.R., *Modern Trends In Islam* (New York: Octagon Book, 1978).
- Hasan, Fuad, *Pendidikan Manusia Indonesia* (Jakarta: Penerbit Kompas dan Yayasan Toyota dan Astra. 2004)
- Idi, Abdullah, *Pengembangan Kurikulum: Teori dan Praktek* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999)
- Idi, Abdullah dan Toto Suharto, *Revitalisasi Pendidikan Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006)
- Kneller, George F., *Introduction to the Philosophy of Education* (New York: John Wiley and Sons, Inc., 1971)
- Kristol, Irving, et.al., *Memotret kanan Baru*, Penyunting Wahyudin (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2001)

- Langgulong, Hasan, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan* (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1989)
- Muhadjir, Noeng, *Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Islam dalam Perspektif Modern* (Makalah Seminar Internasional Modernisasi Pendidikan Islam, Sistem, Metodologi, dan Materi di Pondok Modern Gontor Ponorogo, 31 Agustus 1996).
- O'Neil, William F., *Ideologi-Ideologi Pendidikan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001)
- Poole, Ross, *Moralitas dan Modernitas: Di Bawah Bayang-Bayang Nihilisme*, (Yogyakarta: Kanisius, 1993)
- Rahmat, Jalaluddin, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1991)
- Soetrisno PH, *Welfare State dan Welfare Society* (Yogyakarta: BPFE-UGM, 1992)
- Sim, Stuart, *Derrida dan Akhir dari Sejarah* (Yogyakarta: Jendela, 2002)
- Syam, Muhammad Noor, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila* (Surabaya: Usaha Nasional, 1988)
- Smith, W.A., *The Meaning of consciousness: The Goal of Paulo Freire's Pedagogy*, (Amherst: Center for International Educatio, UMASS, 1976)
- Wahono, Francis, *Kapitalisme Pendidikan: Antara Kompetensi dan Keadilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003)